

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Bacaan

- Bernard Tanya L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, "Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi," Yogyakarta:Genta Publishing, 2006.
- Bernard,Raho, "Teori Sosiologi Modern,"Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Cahyadi E., Antonius, Fernando M. Manullang, "Pengantar ke Filsafat Hukum," Jakarta: Kencana Predana Media Group, Cetakan ke-4, 2011.
- Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis", Bandung: Nusamedia, 2010.
- CST Kansil, Max Boboy, Christine Kansil., "Kemahiran Membuat Perundang-undangan," Jakarta: PT. Perca, Cetakan Pertama, 2003.
- E. Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia," Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Halwani, R. Hendra, "Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi," Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hans Kelsen, "General Theory of Law an State", New York:Rouledge, 2017.
- _____, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif," Bandung: Nusa Media, 2014.
- Heri Mulyono, "Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free Trade Zone," Jakarta:LP3S, 2001.
- Internasional, " Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Kahar Masyhur, . "Membina Moral dan Akhlak, Jakarta: Kalam Mulia", 1985.
- Lebacqz, Karen, " Teori-Teori Keadilan", Bandung: Nusa Media, 1986.
- Maharadja, Apul D., "Membangun Indonesia; Studi kasus Batam", Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 2003.
- Mahfud MD., Moh., "Politik Hukum Di Indonesia," Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum,"Jakarta:Kencana, 2010.
- Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi,"Jakarta : LP3ES, 1993.
- Mohctar Mas' oed., "Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Munir Fuady, "Hukum Dagang Internasional, Aspek Hukum dari WTO," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury "Hukum Dalam Pendekatan Filsafat", Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, 2016.
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi2009., Volume 6 Nomor 1.
- Pareira, Andre H. (ed), "Perubahan Global dan Perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional," Bandung; Almuni, 1999.
- R. Fudyartanta, "ETIKA Inti Sari Filsafat Kesusilaan dan Moral," Yogyakarta: Warawidyani, 1976.
- R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum, "Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-15, 2021.

- Rahardja D., Apul, "Membangun Indonesia, Studi kasus Batam," Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 2003.
- Rawls, John, "A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara," diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- Sadono Sukirno, Makroekonomi, Teori Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Satjipto Rahardjo, "Permasalahan Hukum di Indonesia", Bandung : Alumni, 1993.
- Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1986.
- Suharsimi Arikunto, " Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lunis, "Etika Profesi Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sukirno Sardono, "Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan", Jakarta : Bima Grafika, 1985.
- Sumaryo Suryokusumo, " Praktik Diplomasasi", Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Sumitro Djojohadikusumo, "Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan," Jakarta : Pustaka LP3ES. 1994.
- Syarif Hidayat, Agus Syarif Hidayat (Editor), "Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,Cetakan ke-1, 2010.
- Yohanes Wisok, "ETIKA Mengalami Krisis, Membangun Pendirian," Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muhammad Zaenuddin, "Dasar Hukum dan Kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun", Yogyakarta:Deepublish, 2018.
- L. J. Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum ", Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996.

2. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat Bonded Zone.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang “ Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Beacukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah di tunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas.”
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.
- Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
- Keppres Nomor 54 Tahun 2002 jo. Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.
- Keppres Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
- Keppres Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.
- Keppres Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- Peraturan Menteri Keuangan 47/PMK.04/2012 tentang Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan

Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan 62/PMK.04/2012 tentang Tatacara Pengawasan Pengadministrasian Pembayaran Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/3/2009. Tentang Pelimpahan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Peraturan Menteri Perdagangan No 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor.

Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Barang Impor Modal Bukan Baru.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor

3. Website:

<http://www.wantarakepri.com/> “Pembangunan Terminal BBM di Karimun”, tersedia di. “Pembangunan Terminal BBM di Karimun”, Diunduh tanggal 25 Desember 2021.

<https://bintankab.bps.go.id/indicator/52/42/4/pdrb-kabupaten-bintan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-.html>, diunduh tanggal 20 Desember 2021.

<https://www.tanknewsinternational.com/successful-commissioning-of-pt-oiltanking-karimun-in-indonesia/> di unduh tanggal 20 Desember 2021.

<https://kek.go.id/kek-indonesia>, di unduh 20 Desember 2021.

<https://www.Pertamina.com>

<http://www.beacukaibatam.net> diakses pada tanggal 30 November 2017

<http://batam.tribunnews.com/2017/04/13/peresmian-pt-oil-tanking-nurdin-bujuk-investor-tabur-duit-ke-kepri-jalur-natuna-jadi-pemikat?page=2>, diunduh tanggal 20 Desember 2021.

<http://batam.tribunnews.com/2017/04/13/peresmian-pt-oil-tanking-nurdin-bujuk-investor-tabur-duit-ke-kepri-jalur-natuna-jadi-pemikat?page=2>, diunduh tanggal 20 Desember 2021.

<https://karimunkab.go.id/2017/04/19/peresmian-pt-oil-tanking-karimun/>, diunduh tanggal 20 Desember 2021.

<https://karimunkab.go.id/2017/04/19/peresmian-pt-oil-tanking-karimun/>, diunduh tanggal 20 Desember 2021.

